

PERAN PBB DALAM MENANGANI KONFLIK ISRAEL-PALESTINA TAHUN 2023

Nabila Milenia Melati Sulisty Putri ¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The United Nations (UN), or commonly known as the UN, is an international organization founded on October 24, 1945 to promote international cooperation. This organization is a replacement for the League of Nations which was founded after World War II to prevent similar conflicts from occurring. At its inception, the UN had 51 member states and now has 193 members. Several international and inter-state institutions, in addition to member states, have permanent observer status at the UN Headquarters, while some only have observer status. The Vatican and Palestine are non-member states that have "Permanent" observer status at the UN. (The Holy See has a "permanent" representative at the UN, while Palestine has a "permanent" office at the UN). The main objectives of the UN are to maintain world peace and security, advance and encourage brotherly relations between nations through respect for human rights, foster international cooperation in economic, social, cultural, and environmental development, become a center for coordinating all joint actions against countries that endanger world peace, provide humanitarian assistance in the event of famine, natural disasters, and armed conflict. In this research the author will use the Liberalism approach, because Liberalism believes that the state is not a unitary actor in international politics but also non-state actors who influence the relationship between one state and another. In addition, researchers will also use the Concept of the Role of International Organizations. The research method used by researchers is a qualitative approach and analytical descriptive research type. This research produces findings that show United Nations (UN) policy in efforts to deal with the Israel-Hamas war in 2023.

Keywords: China-Taiwan Conflict, One-China Policy, United States Intervention, US-Taiwan Cooperation

ABSTRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation) atau yang dikenal dengan PBB (UN), adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Organisasi ini sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah konflik yang sama terjadi. Pada awal berdirinya, PBB memiliki 51 negara anggota dan kini memiliki 193 anggota. Beberapa lembaga internasional dan antar-negara, selain negara-negara anggota, memiliki status pengamat permanen di Markas Besar PBB, ada pula yang hanya berstatus sebagai pengamat. Vatikan dan Palestina adalah negara non-member states yang memiliki status pengamat "Permanen" di PBB. (Takhta Suci Vatikan memiliki perwakilan "permanen" di PBB, sementara Palestina memiliki kantor "permanen" di PBB). Tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerja sama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi pusat penyaluran segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Liberalisme, karena Liberalisme berpandangan bahwa negara bukanlah agen tunggal (unitary actor) dalam politik internasional tetapi juga aktor non-negara yang mempengaruhi hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan Konsep Peran Organisasi Internasional. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini menghasilkan temuan yang menunjukkan bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya menangani perang Israel-Hamas pada tahun 2023.

Kata Kunci: Israeli-Palestinian War, International Organizations, United Nations

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Sejak 1948, ketegangan antara kedua pihak terus meningkat dan memicu berbagai peperangan. Eskalasi kekerasan kembali memuncak pada tahun 2023, terutama antara Israel dan Hamas di Gaza, yang menyebabkan krisis kemanusiaan besar, termasuk ribuan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang luas (PPI Malaysia, 2023). Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kembali berperan aktif dalam upaya perdamaian.

Namun, peran PBB menghadapi tantangan struktural, terutama di Dewan Keamanan yang sering mengalami kebuntuan akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara besar (Reuters, 2024). Upaya melalui Majelis Umum menghasilkan sejumlah resolusi, namun pelaksanaannya menghadapi hambatan, baik dari pihak yang berkonflik maupun dari dinamika geopolitik global. Kepentingan politik anggota tetap Dewan Keamanan, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, turut memperumit posisi PBB (Reuters, 2025).

Selain itu, dinamika politik domestik di Israel dan Palestina turut menghambat proses negosiasi. Kendati demikian, melalui mediasi PBB dan dukungan aktor internasional, kesepakatan gencatan senjata berhasil dicapai pada Januari 2025. Kesepakatan ini mencakup pertukaran tahanan dan pemulangan pengungsi, serta menjadi tonggak penting menuju solusi jangka Panjang (Manurung & Heriamsal, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PBB dalam menangani konflik Israel-Palestina pada periode 2023–2025, dengan fokus pada langkah-langkah yang diambil, efektivitas upaya diplomasi, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perdamaian dan perlindungan kemanusiaan.

KERANGKA ANALITIK

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teoritis utama dalam studi hubungan internasional untuk menganalisis peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik Israel-Palestina periode 2023–2025, yakni teori Liberalisme Institusional, Organisasi Internasional, dan Mediasi.

Liberalisme Institusional

Liberalisme institusional menekankan pentingnya institusi internasional dalam menciptakan kerjasama antarnegara meskipun berada dalam sistem internasional yang anarkis). Teori ini melihat institusi seperti PBB sebagai aktor yang menyediakan norma, prosedur, dan mekanisme penyelesaian konflik yang memungkinkan tercapainya perdamaian (Keohane, 2011). Dalam konteks penelitian ini, teori ini menjadi dasar untuk menilai PBB sebagai fasilitator dialog dan penengah yang mampu mengurangi konflik melalui pendekatan multilateral (Jackson & Sorensen, 2013).

Organisasi Internasional

Teori organisasi internasional dipakai untuk mengevaluasi struktur, mandat, dan fungsi PBB sebagai badan yang sah secara hukum dan berperan dalam mengelola isu global, termasuk konflik bersenjata. Mengacu pada pemikiran Archer (2001) bahwa PBB dianalisis dalam tiga

perannya yaitu sebagai instrumen arena dan aktor. Organisasi internasional digunakan sebagai instrumen oleh negara-negara anggota untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan nasional mereka yang memungkinkan negara-negara anggota untuk mengkoordinasikan kebijakan, mengharmonisasi standar, dan mengimplementasikan agenda kerjasama multilateral. Organisasi internasional sebagai arena adalah tempat bagi berbagai aktor internasional berinteraksi, bernegosiasi, dan berkompetisi untuk mempengaruhi agenda dan keputusan kebijakan global. Organisasi internasional sebagai aktor yaitu organisasi internasional dapat berkembang menjadi aktor independen yang memiliki kepentingan, preferensi, dan kapasitas untuk bertindak secara otonom dari negara-negara anggotanya. Kerangka ini berguna dalam memahami bagaimana PBB beroperasi secara fungsional dan struktural dalam menghadapi dinamika geopolitik konflik Israel-Palestina.

Mediasi

Teori mediasi internasional digunakan untuk menelaah PBB sebagai pihak ketiga yang netral dalam proses negosiasi gencatan senjata. Mengacu pada pandangan Bercovitch & Jackson (2009), mediasi yang dilakukan oleh PBB dinilai berdasarkan netralitas, kredibilitas, strategi yang digunakan, dan efektivitasnya dalam mengurangi kekerasan dan menciptakan solusi jangka panjang. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kontribusi PBB dalam tercapainya gencatan senjata tahun 2025. Dimensi penting lainnya supaya mediasi bisa efektif adalah harus mampu menciptakan insentif yang memadai bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk berkompromi. Selain itu, harus ada jaminan bahwa solusi yang ditawarkan tidak akan merugikan salah satu pihak secara sepihak (Mitchell, 1981).

Secara keseluruhan, ketiga kerangka teori ini membentuk fondasi analitis untuk memahami kapasitas, tantangan, dan efektivitas peran PBB dalam konflik Israel-Palestina, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika diplomatik dan institusional yang mempengaruhi proses perdamaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian adalah peran PBB dalam menangani perang Israel-Palestina tahun 2023. Subjek ini dianalisis melalui berbagai dokumen resmi PBB, seperti resolusi Dewan Keamanan, laporan dari badan-badan terkait seperti UNRWA dan UNICEF, serta pernyataan dari Sekretaris Jenderal PBB. Objek penelitian adalah peran PBB dalam mencapai gencatan senjata antara Israel dan Palestina pada tahun 2025. Objek ini mencakup proses diplomasi yang dijalankan, tantangan geopolitik yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam menekan eskalasi konflik.

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain penelitian ini difokuskan pada pemahaman mengenai bagaimana PBB merespons konflik, kebijakan yang diterapkan, serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji peristiwa dalam lingkungan nyata, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan dan keputusan organisasi internasional tersebut. Sugiyono (2017) menekankan bahwa dalam studi kasus, penelitian tidak hanya berfokus pada satu variabel, tetapi juga melihat keterkaitan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi suatu fenomena.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan PBB dalam menangani konflik. Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Croswell, 2014).

PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Israel-Palestina Tahun 2023–2025

Konflik Israel-Palestina mengalami eskalasi signifikan pada periode 2023–2025, diawali oleh serangan besar-besaran Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 yang dikenal dengan nama Operasi Badai Al-Aqsa (BBC News, 2023). Serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan memicu respons militer Israel secara masif terhadap Jalur Gaza, menciptakan siklus kekerasan yang berlangsung hingga tahun 2025.

Ketegangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan akumulasi dari konflik berkepanjangan, yang dimana pada tahun 2023 mencatatkan angka kematian tertinggi sejak 2005 di Tepi Barat. Menurut OCHA, sebanyak 464 warga Palestina, termasuk 109 anak-anak, tewas sepanjang 2023. Israel melakukan pemutusan layanan esensial di Gaza serta blokade terhadap bantuan kemanusiaan, yang dikategorikan sebagai hukuman kolektif dan berpotensi sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional (World Report 2024: Israel and Palestine, 2024).

Pada akhir 2023, situasi kemanusiaan memburuk drastis, dengan lebih dari 1,9 juta orang mengungsi dan 18.700 warga Palestina tewas hingga 12 Desember, termasuk lebih dari 7.800 anak-anak. Infrastruktur sipil seperti rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan mengalami kehancuran masif. WHO dan OCHA mencatat 46.000-unit rumah hancur, 342 sekolah rusak, dan 187 serangan terhadap fasilitas kesehatan, termasuk kerusakan pada 24 rumah sakit (Human Rights Watch, 2023).

Memasuki tahun 2024, intensitas kekerasan meningkat. Amnesty International (2024) melaporkan bahwa hingga Desember 2024, lebih dari 42.000 warga Palestina tewas, termasuk 13.300 anak-anak, dan lebih dari 97.000 lainnya terluka. Data UNOSAT (2024) menunjukkan kerusakan besar pada infrastruktur Gaza, dengan 60.368 bangunan hancur, 20.050 rusak parah, dan 56.292 rusak sedang. Konflik juga meluas ke Lebanon, dengan serangan Israel pada 23 September 2024 yang menewaskan 550 orang dalam satu hari (Aljazeera, 2025).

Menurut Aljazeera (2025), konflik ini melibatkan sejumlah aktor yang diantaranya:

1. Hamas, yang memicu eskalasi dengan dukungan dari Iran.
2. Israel Defense Forces (IDF), yang melakukan operasi udara dan darat skala besar di Gaza.
3. Hizbullah, yang turut terlibat dalam pertempuran lintas batas sejak Oktober 2023.
4. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, yang berperan dalam upaya mediasi.
5. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai organisasi internasional yang mencoba merespons dan menengahi konflik secara diplomatik.

Dinamika geopolitik turut memperumit upaya penyelesaian. Meskipun Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2735 pada Juni 2024 dengan dukungan 14 negara anggota dan abstain dari Rusia yang mengusulkan gencatan senjata komprehensif tiga fase, implementasi di lapangan gagal dilakukan dan konflik tetap berlanjut hingga akhir 2024 (United Nations, 2025).

Peran PBB dalam Menangani Konflik Israel-Palestina

1. PBB sebagai Instrumen

Sebagai organisasi internasional terbesar dan terstruktur, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran sentral dalam mengelola konflik global, termasuk krisis Israel–Palestina. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Archer (2001), organisasi internasional dapat berfungsi sebagai instrumen negara-negara anggota untuk mencapai kepentingan politik nasional. Dalam konteks ini, PBB tidak hanya bertindak sebagai penjaga perdamaian global sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Piagam PBB, tetapi juga sebagai sarana politik, diplomatik, dan hukum yang digunakan oleh aktor-aktor negara.

a. Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) memainkan peran kunci dalam merespons konflik Israel–Palestina sejak eskalasi besar pada Oktober 2023 (Aljazeera, 2024). Sepanjang konflik, telah diusulkan 14 resolusi, namun hanya sebagian yang diadopsi akibat penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat (AS) (BBC, 2024). Veto tersebut kerap menghambat resolusi yang menyerukan gencatan senjata, dengan alasan menjaga proses diplomatik dan melindungi sekutu strategis, yaitu Israel (UK Parliament, 2025). Resolusi penting yang berhasil diadopsi adalah Resolusi 2728 pada Maret 2024 yang menyerukan gencatan senjata selama Ramadhan (BBC, 2024). Selain itu ada juga Resolusi 2735 pada Juni 2024 yang menyambut proposal gencatan senjata tiga fase (UN Press Release, 2024). Kendati demikian, DK PBB menghadapi kebuntuan terkait pengakuan keanggotaan Palestina, yang juga diveto oleh AS. Hal ini mencerminkan dinamika geopolitik dan penggunaan struktur kelembagaan PBB untuk melanggengkan kepentingan nasional negara-negara besar, sesuai dengan karakteristik instrumental organisasi internasional (United Nations, 2024).

b. Majelis Umum PBB

Berbeda dengan DK PBB, Majelis Umum PBB (UNGA/*United Nations General Assembly*) telah menjadi area pertempuran diplomasi yang paling intens dalam menangani konflik Israel-Palestina tahun 2023-2025 menjadi ruang yang lebih inklusif dan representatif dalam merespons krisis. UNGA mengadopsi sejumlah resolusi penting terkait gencatan senjata dan hak-hak rakyat Palestina. Misalnya, resolusi pada 27 Oktober 2023 dan 12 Desember 2023 menyerukan penghentian kekerasan, pembebasan sandera, serta akses kemanusiaan ke Gaza (Aljazeera, 2023). Puncaknya, pada Desember 2024, UNGA mengadopsi resolusi dengan 158 suara mendukung, menuntut gencatan senjata permanen, akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM, serta penolakan terhadap perubahan demografis di Gaza (UN News, 2024). Resolusi ini juga menegaskan pentingnya solusi dua negara dan penyatuan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah pemerintahan Palestina. UNGA

menjadi saluran diplomasi kolektif yang digunakan oleh negara-negara non-veto untuk menyuarakan solidaritas global, membangun tekanan moral, dan melawan dominasi aktor besar di DK PBB (UN News, 2024). Ini memperkuat pandangan liberalisme institusional bahwa organisasi internasional menyediakan ruang interaksi yang lebih normatif dan inklusif.

c. Mahkamah Internasional (ICJ)

Mahkamah Internasional (*ICJ/International Court of Justice*) juga menunjukkan fungsi PBB sebagai instrumen hukum. Pada 29 Desember 2023, Afrika Selatan menggugat Israel atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948 terkait operasi militer di Gaza (International Court of Justice, 2023). Pada 26 Januari 2024, International Court of Justice (2024) mengeluarkan tindakan sementara yang mengikat, yang memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida dan memastikan akses bantuan kemanusiaan. Selain itu, ICJ juga diminta memberikan opini penasihat atas legalitas kebijakan Israel di wilayah pendudukan, termasuk pembangunan permukiman ilegal dan tembok pemisah di Tepi Barat. ICJ turut memantau kepatuhan terhadap perintah-perintah hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana negara-negara menggunakan ICJ sebagai strategi hukum internasional untuk memperjuangkan kepentingan normatif dan politik mereka melalui jalur legal yang sah.

2. PBB sebagai Arena

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran sentral sebagai arena diplomatik tempat negara-negara, baik besar maupun kecil, dapat menyuarakan kepentingan dan merundingkan solusi atas konflik global. Mengacu pada pandangan Archer (2001), PBB menyediakan wadah interaksi multilateral yang memungkinkan negosiasi tetap berlangsung, bahkan di tengah ketegangan politik dan perbedaan strategis antar negara.

Dalam konflik Israel–Palestina 2023–2025, PBB menjalankan fungsi tersebut secara nyata. Meskipun awalnya mengalami hambatan karena veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan, PBB tetap aktif dalam mendorong resolusi damai. Titik balik terjadi dengan diadopsinya Resolusi 2728 pada Maret 2024 dan Resolusi 2735 pada Juni 2024 yang menuntut gencatan senjata dan akses bantuan kemanusiaan. Keberhasilan ini tercapai berkat diplomasi intensif yang melibatkan negara-negara Arab, Uni Eropa, dan anggota non-permanen Dewan Keamanan (United Nations, 2024).

PBB kemudian menginisiasi pendekatan diplomasi *multi-track* dengan melibatkan Qatar, Mesir, dan AS sebagai mediator utama. Ketiga negara ini, bersama PBB, menyusun bridging proposal yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata tiga fase pada 19 Januari 2025 (American University, 2025). Fase pertama mencakup penghentian permusuhan, penarikan pasukan Israel dari Gaza, serta pertukaran sandera dan tahanan (NPR, 2025). Dalam implementasinya, PBB mengerahkan badan-badan seperti UNRWA, OCHA, dan WHO untuk memastikan distribusi bantuan dan monitoring di lapangan (NPR, 2025).

Presiden Israel, Isaac Herzog, menyambut proposal ini dan menyerukan kepada

kabinet dan pemerintah Israel untuk menerima dan menyetujui proposal tersebut ketika diajukan. Hamas juga mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa pentingnya mengerahkan segala upaya agar putaran negosiasi kali ini berhasil. Setelah gencatan senjata mulai berlaku, PBB mengambil peran sentral dalam mengawasi dan implementasi kesepakatan (American University, 2025).

Transformasi PBB dari fasilitator menjadi penjamin implementasi kesepakatan menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya sebagai arena global. Mediasi ini juga memperlihatkan efektivitas pendekatan non-koersif sebagaimana dijelaskan oleh Mitchel (1981) yaitu melalui komunikasi, fasilitasi, dan insentif bertahap yang membangun kepercayaan antar pihak. Dalam perspektif liberalisme institusional, PBB telah membuktikan fungsinya sebagai lembaga yang menciptakan struktur kerja sama, memperkuat norma kolektif, dan mereduksi ketidakpastian antar negara. Forum-forum formal dan informal yang difasilitasi PBB menjadi titik temu kepentingan internasional yang memungkinkan tercapainya kesepakatan damai.

Secara keseluruhan, peran PBB sebagai arena tidak hanya sekadar simbolis, tetapi telah berkembang menjadi platform koordinatif yang adaptif, menggabungkan diplomasi formal dan informal dalam mengelola konflik kontemporer yang kompleks seperti Israel–Palestina.

3. PBB sebagai Aktor

Menurut Archer (2001), organisasi internasional seperti PBB bukan hanya perpanjangan kepentingan negara-negara anggotanya, tetapi juga aktor independen yang memiliki preferensi, kapasitas, dan inisiatif sendiri. Peran ini terlihat dalam respons PBB terhadap konflik Israel–Palestina 2023–2025, melalui badan-badannya yang secara aktif menjalankan mandat kemanusiaan, tanpa menunggu kesepakatan antarnegara.

a. UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*)

UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) merupakan badan PBB yang paling bekerja keras dalam konflik Israel-Palestina 2023-2025. Sebagai badan PBB yang didirikan pada tahun 1949, UNRWA memiliki mandat untuk menyediakan bantuan dan perlindungan bagi jutaan pengungsi Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah (UNRWA, 2020). Dalam konteks eskalasi konflik yang terjadi tahun 2023-2025, peran badan ini menjadi semakin krusial. Dalam periode konflik tersebut, UNRWA memberikan tempat tinggal bagi lebih dari satu juta orang, menyediakan layanan kesehatan dengan jutaan konsultasi medis, serta memastikan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan dukungan psikososial. Bahkan di tengah keterbatasan dan risiko tinggi, UNRWA tetap menjalankan tugasnya, meskipun harus kehilangan ratusan staf dan mengalami kerusakan pada ratusan fasilitasnya. Peran UNRWA bahkan melampaui fungsinya sebagai lembaga bantuan biasa, menjelma menjadi semacam struktur negara bagi para pengungsi Palestina, yang mencerminkan kapasitas organisasional yang tangguh dan otonom (UNRWA, 2025).

b. OCHA (*Office for The Coordination of Humanitarian Affairs*)

OCHA (*Office for The Coordination of Humanitarian Affairs*) merupakan badan PBB yang memiliki peran sentral sebagai coordinator utama respons kemanusiaan internasional. Badan ini didirikan pada tahun 1991 dan memiliki mandat untuk memobilisasi dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan yang efektif dalam menangani keadaan darurat yang kompleks. Dalam konflik Israel-Palestina periode 2023-2025, OCHA memainkan peran yang sangat penting untuk mengatur bantuan kemanusiaan yang diberikan (OCHA, 2025).

c. OHCHR (*Office of The High Commissioner for Human Rights*)

OHCHR (*Office of The High Commissioner for Human Rights*) merupakan badan PBB yang juga berperan penting dalam menangani konflik Israel-Palestina periode 2023-2025. Mandat OHCHR mencakup pemantauan, pelaporan, dan advokasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara. Dalam konflik Israel-Palestina yang sarat dengan hak asasi manusia, badan ini menjadi suara penting yang menyuarakan dampak terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran yang kompleks dan berlapis dalam menangani konflik Israel-Palestina pada periode 2023–2025. PBB berfungsi sebagai instrumen yang digunakan oleh negara-negara anggota, termasuk kekuatan besar seperti Amerika Serikat, untuk mengartikulasikan dan mengejar kepentingan politik luar negeri mereka, namun tetap memberi ruang bagi negara berkembang dalam forum seperti Majelis Umum. Selain itu, PBB juga berperan sebagai arena diplomasi multilateral yang memungkinkan terbentuknya koordinasi antara berbagai mediator regional, menunjukkan kemampuannya memfasilitasi diplomasi formal maupun informal. Lebih jauh, PBB tampil sebagai aktor independen dengan kapasitas teknis dan normatif yang kuat, terbukti dari aksi langsung badan-badannya seperti UNRWA, OCHA, dan OHCHR dalam menangani krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia secara aktif dan mandiri. Keseluruhan kontribusi ini berpuncak pada tercapainya gencatan senjata pada Januari 2025, yang mencerminkan efektivitas PBB dalam menjalankan peran sebagai instrumen, arena, sekaligus aktor dalam konflik internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, Verelladevanka. “Upaya PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina”. *Kompas* (23 Oktober 2023). Internet. 23 Februari 2025.
- Aljazeera. “Timeline: The path to the Israel-Hamas ceasefire deal in Gaza”. *Aljazeera* (19 Januari 2025). Internet. 29 Juni 2025.
- Aljazeera. “UNGA calls for humanitarian truce in Israel-Gaza war: How countries voted”. *Aljazeera* (27 Oktober 2023). Internet. 30 Juni 2025.

- Aljazeera. "UNGA demands ceasefire in Israel's war on Gaza: How your country voted". *Aljazeera* (12 Desember 2023). Internet. 30 Juni 2025.
- Aljazeera. "US, Qatar and Egypt say mediators will work to finalise Gaza ceasefire deal". *Aljazeera* (16 Agustus 2024). Internet. 1 Juni 2025.
- Aljazeera, "How has the UNSC voted since the beginning of Israel's war on Gaza?". *Aljazeera* (21 November 2024). Internet. 11 Juli 2025.
- American Jewish Committee. "Timeline: Key Events in the Israel-Arab and Israeli-Palestinian Conflict". *American Jewish Committee* (2025). Internet. 29 Juni 2025.
- Amnesty International. "Amnesty International investigation concludes Israel is committing genocide against Palestinians in Gaza". *Amnesty International* (5 Desember 2024). Internet. 29 Juni 2025.
- Archer, Clive. (2001). *International Organizations*. London: Routledge.
- Auli, Renata Christha. "Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina". *Hukum Online* (21 November 2023). Internet. 23 Februari 2025.
- Bercovitch, Jacob. (1996). *Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation*. Lynne Rienner Publishers.
- Bercovitch, Jacob dan Allison Houston. (2000). "Why Do They Do It Like This? An Analysis of the Factors Influencing Mediation Behavior in International Conflicts". *Journal of Conflict Resolution*, 44(2), 170–202.
- Bercovitch, Jacob dan Richard Jackson. (2009). *Conflict Resolution in the Twenty-first Century: Principles, Methods and Approaches*. University of Michigan Press.
- Brown, Michael E., Owen R. Cote Jr, Sean M. Lynn-Jones, dan Steven E. Miller. (1998). *Theories of War and Peace*. New York: MIT Press.
- Brunnstrom, David dan Simon Lewis. "US vetoes UN Security Council resolution on Gaza ceasefire". *Reuters* (21 November 2024). Internet. 1 Juni 2025.
- Burchill, Scott, Andrew Linklater, dan Richard Devetak. (2013). *Theories of International Relations*. Bloomsbury Publishing.
- Center for Preventive Action. "Israeli-Palestinian Conflict". *Global Conflict Tracker* (28 Mei 2025). Internet. 1 Juni 2025.
- Cordall, Simon Speakman dan Maram Humaid. "Gaza's 2024: A year of war and misery". *Aljazeera* (31 Desember 2024). Internet. 29 Juni 2025.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

Approaches. New York: SAGE.

Fajar, Angga Arven. "Perang dan Perdamaian: Menggali Akar Konflik Israel-Palestina yang Tak Berujung". *Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia* (3 Desember 2024). Internet. 23 Februari 2025.

Hassentab, Nicole. "Understanding the Israel-Hamas Ceasefire Agreement". *American University* (20 Januari 2025). Internet. 1 Juni 2025.

Human Rights Watch. "Gaza: Findings on October 17 al-Ahli Hospital Explosion". *Human Rights Watch* (26 November 2023). Internet. 29 Juni 2025.

Human Rights Watch. "World Report 2024: Israel and Palestine". *Human Rights Watch* (2024). Internet. 29 Juni 2025.

International Court of Justice. "Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)". *International Court of Justice* (29 Desember 2023). Internet. 30 Juni 2025.

International Court of Justice. "Summary of the Order of 26 January 2024". *International Court of Justice* (26 Januari 2024). Internet. 30 Juni 2025.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford University Press.

Keohane, Robert O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.

Keohane, Robert O. (1989). *Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World Politics. International Institutions and State Power*. Boulder: Westview Press.

Keohane, Robert O. dan Joseph S. Nye. (2011). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. London: Longman.

Khair, Aulia Ul. (2024). "Strategi Diplomasi Qatar dalam Kesepakatan Pertukaran Tawanan antara Hamas-Israel pada November 2023". *Padjajaran Journal of International Relations*.

Knell, Yolande, Raffi Berg, dan David Gritten. "Israel attack: PM says Israel at war after 250 killed in attack from Gaza". *BBC News* (7 Oktober 2023). Internet. 29 Juni 2025.

Manurung, Felix Broson dan Krisman Heriamsal. (2024). "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel". *Jurnal Hubungan Luar Negeri* Vol. 9 No. 1.

Marx, Willem, Jerome Socolovsky, et.al. "Israel and Hamas reach a Gaza ceasefire agreement". *NPR* (15 Januari 2025). Internet. 1 Juni 2025.

Mingst, Karen dan Margaret Karns. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Lynne Rienner Publishers.

Mishra, Vibhu. "UN General Assembly demands Israel end 'unlawful presence' in Occupied Palestinian Territory". *UN News* (18 September 2024). Internet. 30 Juni 2025.

Mitchell, Christopher. (1981). *The Structure of International Conflict*. Macmillan.

Nichols, Michelle. "UN General Assembly Overwhelmingly Demands Immediate Gaza Ceasefire". *Reuters* (12 Desember 2024). Internet. 23 Februari 2025.

OCHA. "About us". *OCHA*. Internet. 1 Juni 2025.

OCHA. "Humanitarian Situation Update Gaza Strip". *OCHA*. Internet. 1 Juni 2025.

OCHA. "Reported impact snapshot | Gaza Strip (24 December 2024)". *OCHA* (24 Desember 2024). Internet. 29 Juni 2025.

OCHA. "We Coordinate". *OCHA*. Internet. 1 Juni 2025.

OHCHR. "About UN Human Rights". *OHCHR*. Internet. 1 Juni 2025.

OHCHR. ""More than a human can bear": Israel's systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since October 2023". *OHCHR* (13 Maret 2025). Internet. 1 Juni 2025.

OHCHR. "News on the situation in the Occupied Palestinian Territory, Israel and Lebanon". Internet. 1 Juni 2025.

OHCHR. "The Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel". *OHCHR*. Internet. 1 Juni 2025.

OHCHR. "Thematic Report - Detention in the context of the escalation of hostilities in Gaza (October 2023-June 2024)". *OHCHR* (31 Juli 2024). Internet. 1 Juni 2025.

OHCHR. "UN Commission finds war crimes and crimes against humanity in Israeli attacks on Gaza health facilities and treatment of detainees, hostages". *OHCHR* (10 Oktober 2024). Internet. 1 Juni 2025.

Psaledakis, Daphne dan David Brunnstrom. "Russia, China Veto US-Led UN Resolution on Gaza Ceasefire". *Reuters* (23 Maret 2024). Internet. 23 Februari 2025.

Shalaby, Ethar. "Resolusi Dewan Keamanan PBB: Apakah gencatan senjata bisa diterapkan di Gaza?". *BBC* (30 Maret 2024). Internet. 11 Juli 2025.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supingah, Iping. “Sekjen PBB Sambut Baik Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza”. *Suara Surabaya* (16 Januari 2025). Internet. 23 Februari 2025.

UK Parliament. “Israel and the Occupied Palestinian Territories in 2023-25: UN, ICC and ICJ statements and actions”. *UK Parliament* (13 Januari 2025). Internet. 11 Juli 2025.

UN News. “UN General Assembly demands Gaza ceasefire and hostage release, affirms 'full support' for UNRWA”. *UN News* (12 Desember 2024). Internet. 30 Juni 2025.

United Nations. “Adopting Resolution 2735 (2024) with 14 Votes in Favour, Russian Federation Abstaining, Security Council Welcomes New Gaza Ceasefire Proposal, Urges Full Implementation”. *United Nations* (10 Juni 2024). Internet. 29 Juni 2025.

United Nations. “Following Gaza Ceasefire, Formation of New Governments in Lebanon, Syria, Speakers in Security Council Discuss Ways to Ensure Steps Bring Positive Change for Region”. *United Nations* (20 Januari 2025). Internet. 1 Juni 2025.

United Nations. “International Court of Justice and the question of Palestine”. *United Nations* (19 Februari 2024). Internet. 30 Juni 2025.

United Nations. “Noting More than 45,000 Palestinians Have Been Killed in Gaza, Assistant Secretary-General Tells Security Council 'Ceasefire Is Long Overdue'”. *United Nations* (18 Desember 2024). Internet. 23 Februari 2025.

United Nations. “Resolution 2728 (2024) / adopted by the Security Council at its 9586th meeting, on 25 March 2024”. *United Nations* (25 Maret 2024). Internet. 1 Juni 2025.

United Nations. “Resolution 2735 (2024) / adopted by the Security Council at its 9650th meeting, on 10 June 2024”. *United Nations* (10 Juni 2024). Internet. 1 Juni 2025.

United Nations. “Six-month update report on the human rights situation in Gaza: 1 November 2023 to 30 April 2024 – OHCHR”. *United Nations* (8 November 2024). Internet. 1 Juni 2025.

United Nations. “UN Special Committee finds Israel's warfare methods in Gaza consistent with genocide, including use of starvation as weapon of war”. *United Nations* (14 November 2024). Internet. 1 Juni 2025.

United Nations. “With Israeli Laws Set to Take Effect in 48 Hours, UN Palestine Refugee Agency Chief Warns Security Council of Risks to Gaza Ceasefire, Recovery Efforts”. *United Nations* (28 Januari 2025). Internet. 30 Juni 2025.

United Nations. “Days after United States Vetoes Security Council Resolution Calling for Immediate Gaza Ceasefire, Special Coordinator Warns against Undoing Decades of Work towards Peace”. *United Nations*. (25 November 2024), Internet, 11 Juli 2025.

United Nations. “Adopting Resolution 2735 (2024) with 14 Votes in Favour, Russian

Federation Abstaining, Security Council Welcomes New Gaza Ceasefire Proposal, Urges Full Implementation”. *United Nations*. (10 Juni 2024), Internet, 11 Juli 2025.

UNRWA. “About UNRWA fact sheet”. *UNRWA*. Internet. 30 Juni 2025.

UNRWA. “UNRWA Emergency Response to the Ongoing Humanitarian Crisis in The Occupied Palestinian Territory”. *UNRWA* (11 Juli 2024). Internet. 30 Juni 2025.

UNRWA. “UNRWA Situation Report #171 on The Humanitarian Crisis in The Gaza Strip and The West Bank, Including East Jerusalem”. *UNRWA* (16 Mei 2025). Internet. 30 Juni 2025.

UNRWA. “UNRWA Situation Report #177 on The Humanitarian Crisis in The Gaza Strip and The West Bank, Including East Jerusalem”. *UNRWA* (27 Juni 2025). Internet. 30 Juni 2025.

UNOSAT. “Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment”. *UNOSAT* (13 Desember 2024). Internet. 29 Juni 2025.

VOA Indonesia. “Sekjen PBB Puji Kesepakatan Gencatan Senjata Israel-Hamas”. *VOA Indonesia* (16 Januari 2025). Internet. 23 Februari 2025.